



**LAPORAN KINERJA (LKj) INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Lampung Tengah, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai media pertanggungjawaban atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah secara berkelanjutan, sehingga laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Secara umum Laporan Kinerja (Lkj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 ini memuat informasi tentang Perencanaan dan Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Periode 2016-2021, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta juga memuat pertanggung jawaban aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja di tahun mendatang, dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Gunung Sugih, 30 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG TENGAH



Loekman Djoyosoemarto

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB. I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1-1
2. Dasar Hukum	I-3
3. Maksud dan tujuan	I-5
4. Kondisi Geografis Daerah	I-6
5. Luas Wilayah	I-9
6. Topografi	I-9
7. Kondisi Umum Demografi	I-11

BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

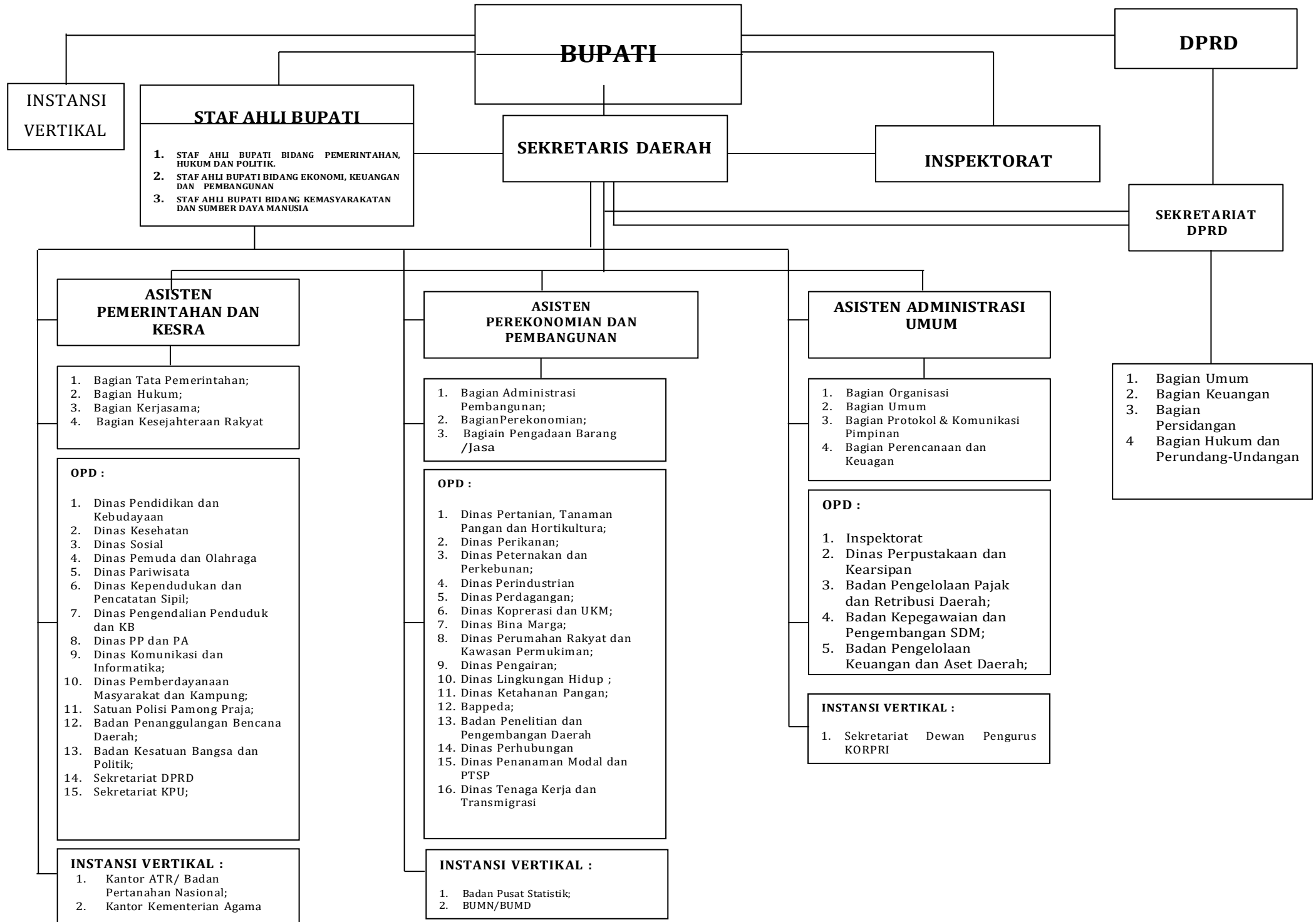
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021	II-25
2. Penetapan Kinerja Tahun 2019	II-50

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Misi I	III-58
B. Misi II	III-61
C. Misi III	III-65
D. Misi IV	III-72
E. Misi V.....	III-77
F. Misi VI	III-80

BAB. IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 ini merupakan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai perwujudan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021, Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 adalah **“MENJADIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH SEBAGAI LUMBUNG PANGAN YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”**,

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.
3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
5. Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan Pro Rakyat.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019, maka dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sebagai berikut :

Misi 1, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Prosentase rasio angka kriminalitas atau jumlah tindak kriminalitas dalam 1 Tahun per jumlah penduduk pada Tahun 2019 sebesar 4,25 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan pada Tahun 2018 sebesar 6,5 persen.
- Jumlah kasus konflik sosial yang terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0 kasus atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 0 kasus.
- Prosentase situs budaya yang lestari pada Tahun 2019 sebesar 70 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 55 persen.

- Prosentase sanggar seni budaya yang aktif pada Tahun 2019 sebesar 80 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 60 persen.

Misi 2, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Keberhasilan pembangunan dibidang prasarana jalan dilihat dari jalan kabupaten yang kondisinya baik. Pada Tahun 2019 prosentase panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik atau jumlah seluruh jaringan jalan sebesar 61,08 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 55,63 persen.
- Pada Tahun 2019 prosentase pelayanan angkutan jalan sebesar 60,00 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun 2018 sebesar 54,00 persen.
- Pada Tahun 2019 jaringan irigasi di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 2.780.985 meter meliputi Jaringan Irigasi Primer 691.920 meter, Sekunder 496.940 meter dan Tersier 1.592.125 meter. Pada Tahun 2019 jaringan irigasi primer yang kondisinya baik mencapai 81,40% persen atau sama dengan Tahun 2018 81,40. Jaringan Irigasi Sekunder yang kondisi baik pada Tahun 2019 mencapai 78,01 persen atau sama dengan Tahun 2018 sebesar 78,01 persen, sedangkan irigasi tersier yang kondisinya baik pada Tahun 2019 mencapai 37,08 persen atau meningkat 5,93 persen dibanding pada Tahun 2018 sebesar 31,15 persen.
- Pada Tahun 2019 jumlah rumah tangga yang menghuni rumah sehat (rumah layak huni) sebanyak 287.502 rumah tangga atau sebesar 86,18 persen dari 338.519 rumah tangga yang ada, jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding pada Tahun

2018 yang sebesar 85,54 persen dari 335.167 rumah tangga yang ada. Hal ini disebabkan makin tingginya kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah sehat, yang layak huni. Selain itu juga didukung oleh stimulasi pembangunan rumah sehat bagi masyarakat miskin.

- Pada Tahun 2019 prosentase penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 1,54 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,36 persen jika dibandingkan pada Tahun 2018 sebesar 1,9 persen.
- Pada Tahun 2019 jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 88,12 persen dari jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2018 yang sebesar 86,15 persen. Hal ini disebabkan karena makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan adanya bantuan pembangunan sumur bor sebanyak 120 titik yang tersebar di 28 kecamatan.
- Pada Tahun 2019 jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban sehat sebesar 93,12 persen dari jumlah rumah tangga yang ada yaitu sebesar 335.167 rumah tangga. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding Tahun 2018 sebesar 93,04 persen dari jumlah rumah tangga yang ada. Hal ini disebabkan makin tingginya kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan Jamban Keluarga, selain itu juga didukung oleh pembangunan MCK serta pembangunan jamban keluarga.

- Prosentase cakupan layanan telekomunikasi pada Tahun 2019 sebesar 72,50 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 45,00 persen.

Misi ke-3, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Prosentase pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2019 sebesar 2,03 persen.
- Prosentase pertumbuhan ekonomi sektor industri pada Tahun 2019 sebesar 8,63 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 5,45 persen.
- Prosentase pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan pada Tahun 2019 sebesar 6,51 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 4,41 persen.
- Prosentase peningkatan volume usaha koperasi pada Tahun 2019 sebesar 17,23 persen persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 9,79 persen.
- Prosentase peningkatan volume usaha UMKM/UKM pada Tahun 2019 sebesar 9,87 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 9,42 persen.
- Prosentase peningkatan jumlah wisatawan pada Tahun 2018 sebesar 77,63 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 21,11 persen.
- Rata-rata lama tinggal wisatawan pada Tahun 2019 selama 1 hari atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan Tahun 2018 selama 1 hari.
- Prosentase peningkatan nilai investasi pada Tahun 2019 sebesar 9 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 1 persen.

- Prosentase angka kemiskinan pada Tahun 2019 sebesar 12,62 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 12,90 persen.
- Prosentase angka pengangguran terbuka pada Tahun 2019 sebesar 2,62 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 3,08 persen.
- Prosentase peningkatan jumlah Kampung dengan kategori cepat berkembang pada Tahun 2019 sebesar 14,14 persen atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 2,99 persen. Hal ini dikarenakan pada Tahun anggaran 2019 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dana alokasi Kampung kurang lebih sebesar Rp.142.585.342.200,- yang dialokasikan untuk 301 Kampung. Alokasi tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung dan pembinaan kemasyarakatan.
- Jumlah penduduk yang mengikuti program transmigrasi keluar Lampung Tengah pada Tahun 2019 sebanyak 13 KK atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 sebanyak 15 KK.
- Rasio ketersediaan pangan atau jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)/jumlah penduduk pada Tahun 2019 sebesar 368,17 kg/penduduk/Tahun atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 438,29 kg/penduduk/Tahun. Secara umum keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat dilihat dari skor Pola Pangan harapan (PPH), Ketersediaan Pangan Utama (beras) per kapita per Tahun, dan ketersediaan energi, lemak dan protein. Pada Tahun 2019

Skor PPH Kabupaten Lampung Tengah mencapai 85,2 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,5 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 yang sebesar 86,7 persen. Hal ini disebabkan menurunnya nilai pola pangan harapan untuk jenis pangan kacang-kacangan yang sebelumnya 9,8 menjadi 3,8. Penurunan ini dikarenakan menurunnya impor kacang-kacangan di Tahun 2019 yang berakibat penurunan ketersediaan dan konsumsi produk tersebut oleh masyarakat. Sedangkan untuk jenis produk lainnya beberapa meningkat dan yang lainnya tetap.

Misi ke 4, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Rata-rata lama sekolah penduduk per jumlah penduduk pada Tahun 2019 sebesar 8,09 Tahun atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 7,60 Tahun.
- Lamanya harapan sekolah pada Tahun 2019 sebesar 12,25 Tahun atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 12,23 Tahun.
- Nilai rata-rata ujian SD pada Tahun 2019 sebesar 76 atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 73,35.
- Nilai rata-rata ujian SMP pada Tahun 2019 sebesar 81 atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 80,59.
- Usia harapan hidup/angka harapan hidup adalah rata-rata Tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakat pada Tahun 2019 sebesar 69,46 Tahun atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 69,35 Tahun.

- Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2019 sebesar 3,63 atau mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2018 sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup.
- Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2019 sebesar 17 atau mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2018 sebesar 40 per 100.000 KH.
- Prosentase prevalensi stunting pada Tahun 2019 sebesar 13,85 persen atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 21,00 persen.
- Indek pembangunan gender pada Tahun 2019 sebesar 89,40 atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 89,24.
- Prosentase Penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Tahun 2019 sebesar 100 persen dari 45 kasus atau mengalami peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dibandingkan Tahun 2018 sebanyak 20 kasus.
- Prosentase peningkatan jumlah wirausahaan muda pada Tahun 2019 sebesar 3 persen atau tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 3 persen.
- Prosentase cabang olah raga yang berprestasi pada Tahun 2019 sebesar 28 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 25 persen.

Misi ke 5, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2019 indek kualitas air sebesar 71,48 IKA atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 41,67 IKA.

- Pada Tahun 2019 indek kualitas udara sebesar 86,35 IKU atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 81,24 IKU.
- Pada Tahun 2019 indek tutupan lahan sebesar 30,13 TL atau sama jika dibandingkan Tahun 2018 sebesar 30,13 TL.
- Pada Tahun 2019 ketaatan terhadap RT RW sebesar 95,32 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 89,00 persen.
- Pada Tahun 2019 persentase desa siaga bencana sebesar 3,86 persen atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 0 persen.

Misi ke 6, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah. Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah adalah nilai hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi Pemerintah daerah pada Tahun 2019 adalah B dengan bobot nilai sebesar 62,05. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 1,92 dibandingkan Tahun 2018 nilai B dengan bobot nilai 60,13.
- Pada Tahun 2019 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan Tahun 2018 adalah WTP.
- Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah pada Tahun 2019 sebesar 7,5 persen atau mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2018 sebesar 13 persen.
- Nilai Indek Kepuasan Masyarakat yang dicapai pada Tahun 2019 adalah 85,90 atau mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun 2018 sebesar 80,59.

Secara umum keseluruhan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 telah berhasil dicapai dan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun didalam pelaksanaan masih dijumpai permasalahan dan kendala, namun secara umum dapat diatasi secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang berarti dalam pencapaian target sasaran tersebut. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul pada Tahun yang akan datang, telah dilakukan langkah-langkah antisipasi terutama meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program, baik dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019, semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun Anggaran. Laporan Kinerja (LKj), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal Tahun Anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah

dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun LKj Tahunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara No.091), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor: 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3825);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131. 18 – 6118 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Tengah Propinsi Lampung.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016–2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019 ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2019 kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Laporan kemajuan (*Progress Report*) secara nyata, jelas, dan transparan atas pelaksanaan program kerja/ kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan tolok ukur Renstra/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program kerja guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

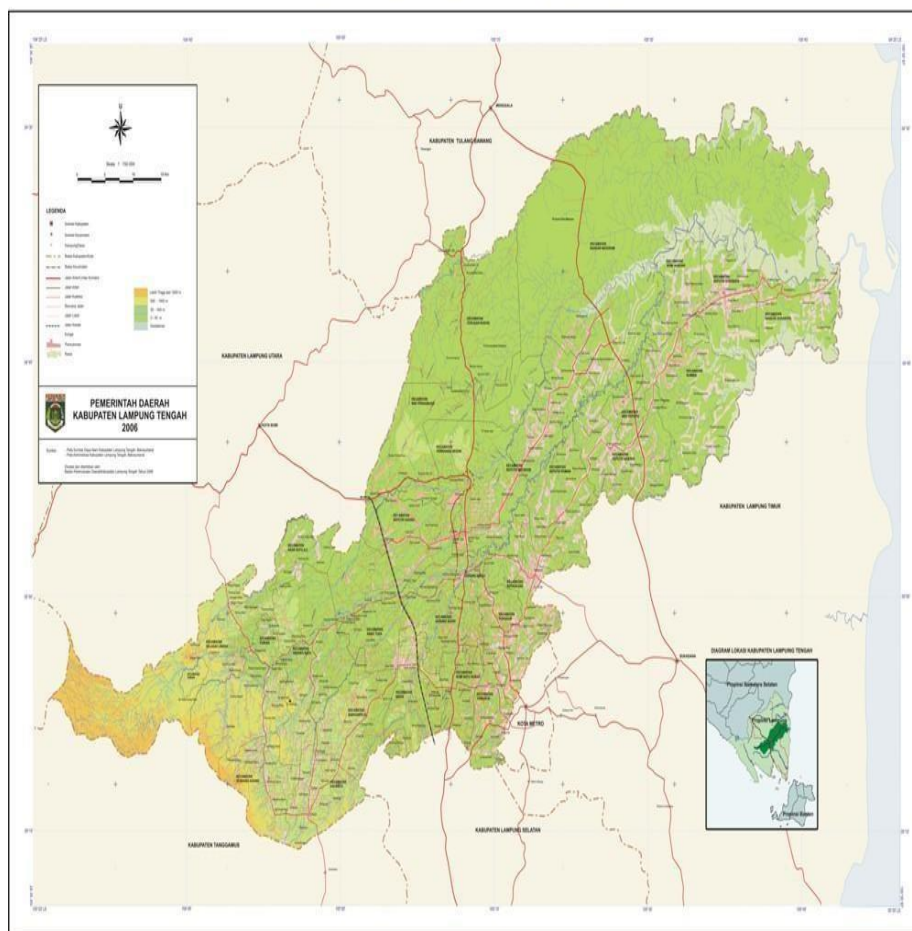
1.4. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1.4.1. Batas Administrasi

Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal seluas 4.789,82 Km² yang terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Utara
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran dan Lampung Selatan
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

PETA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah Terdiri atas satu Kabupaten dan 28 Kecamatan dengan 311 Kampung dan 10 Kelurahan, dengan perincian :

Tabel 1.1
Jumlah Kampung Dan Kelurahan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

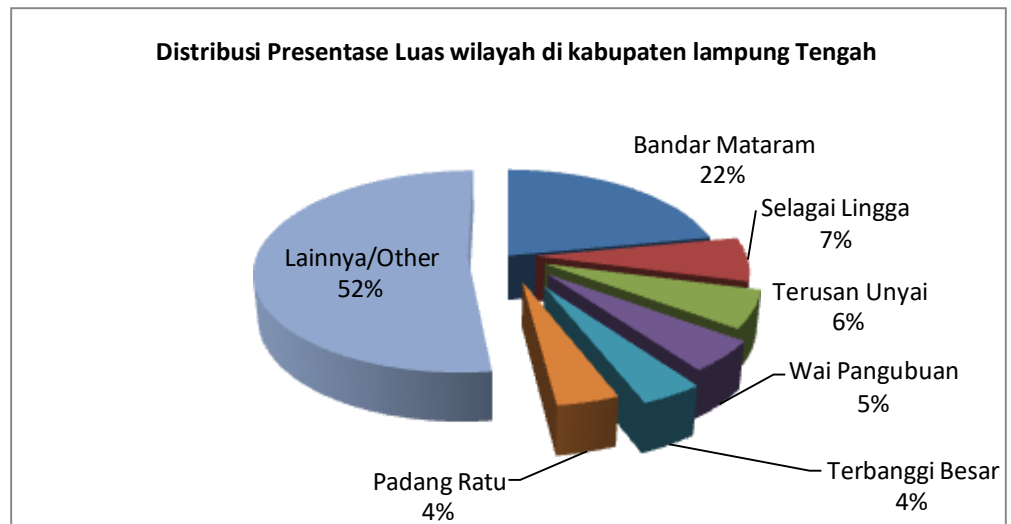
Kecamatan	Kampung	Kelurahan
1. Padang Ratu	15	-
2. Selagai Lingga	14	-
3. Pubian	20	-
4. Anak Tuha	12	-

5. Anak Ratu aji	6	-
6. Kalirejo	17	-
7. Sendang Agung	9	-
8. Bangun Rejo	17	-
9. Gunung Sugih	15	4
10. Bekri	8	-
11. Bumi Ratu Nuban	10	-
12. Trimurjo	14	3
13. Punggur	9	-
14. Kota Gajah	7	-
15. Seputih Raman	14	-
16. Terbanggi Besar	10	3
17. Seputih Agung	10	-
18. Way Pengubuan	8	-
19. Terusan Nunyai	7	-
20. Seputih Mataram	12	-
21. Bandar Mataram	9	-
22. Seputih Banyak	13	-
23. Way Seputih	6	-
24. Rumbia	9	-
25. Bumi Nabung	7	-
26. Putra Rumbia	10	-
27. Seputih Surabaya	13	-
28. Bandar Surabaya	10	-
Jumlah	311	10

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

1.4.2. Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 4°30'-4°15' Lintang Selatan dan 104°35'- 105°50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 4.789,82 km². Dari luas Provinsi Lampung 35.376 km².



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

1.4.3. Topografi

Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim Tropis-Humid dengan angin laut bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 Km/Jam, memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 26°C - 28°C pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter.

Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33°C dan juga temperatur minimum 22°C. Sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%).

Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan penggolongan sebagai berikut :

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).
- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Padang Ratu, dan Kalirejo.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Padang Ratu, dan Kalirejo.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Padang Ratu, dan Kalirejo.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan menjadi 5 golongan yaitu :

a. Tanah Usaha Khusus I

Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0 – 7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terusmenerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.

- b. Tanah Usaha Utama IA dan B
Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar dan pada ketinggian ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.
- c. Tanah Usaha Utama IC
Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa diairi relatif berkurang.
- d. Tanah Usaha Utama ID
Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.
- e. Tanah Usaha Utama II
Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.
- f. Tanah Usaha Utama II
Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

1.5. KONDISI UMUM DEMOGRAFI

1.5.1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2019 berjumlah 1.281.310 jiwa. Data ini meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2018 yang berjumlah 1.271.566 jiwa. Komposisi penduduk Tahun

2019 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 651.323 jiwa dan perempuan sebanyak 629.987 jiwa.

1.5.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan tingkat kemajuan masyarakat, makin tinggi tingkat pendidikan maka gambaran kemajuan masyarakat makin tinggi. Berikut ini gambaran keadaan pendidikan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 menurut ijazah yang dimiliki adalah tidak/belum sekolah 4,05 persen, tidak punya ijazah SD 23,69 persen, memiliki ijazah SD/MI/Paket A 21,37 persen, sedangkan yang memiliki ijazah SMP/MTs/Paket B 28,76 persen, SMA/SMK/MA/Paket C 17,38 persen dan Diploma I sampai dengan Universitas mencapai 4,75 persen.

1.5.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Ketenagakerjaan jika ditinjau dari dimensi ekonomi dan dimensi sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan, berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan ekonomi.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2019 umumnya berusaha pada sektor pertanian yaitu sebesar

43,61 persen, kemudian diikuti sektor jasa 32,90 persen dan sektor manufaktur 23,49 persen.

1.5.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada Tahun 2015 telah dilakukan perubahan metodologi penghitungan IPM, hal ini dilakukan karena sudah tidak relevannya indikator-indikator yang dipergunakan untuk dapat dibandingkan antar daerah secara baik. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*).
- Pengetahuan (*knowledge*)
- Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

Indeks kesehatan menggunakan variabel Angka Harapan Hidup saat Lahir-AHH (*Life Expectancy- e_0*) yaitu sebagai rata-rata perkiraan banyak Tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, hal ini dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Indeks pendidikan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah-RLS (*Mean Years of Scholling-MYS*) dan Harapan

Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling- EYS*).Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah Tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Indeks Pengeluaran menggunakan variabel Pengeluaran Perkapita,disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Secara umum level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama, namun ini tidak mengindikasikan penurunan nilai IPM, karena penurunan ini disebabkan adanya perbedaan indikator dan metodologi penghitungannya.

Berdasarkan hasil perhitungan IPM pada Tahun 2018 Kabupaten Lampung Tengah nilai IPM 69,73 Dengan rincian Angka Harapan Hidup 69,46 Tahun, Harapan Lama Sekolah 12,90 Tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 7,51 Tahun dan Pengeluaran Per Kapita Rp 11,052 juta.

1.6. KONDISI EKONOMI

1.6.1. Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi lahan basah 77.721 Ha dan potensi lahan kering yang cocok untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura 144.049 Ha.

Pada Tahun 2019 luas lahan padi seluas 155.434 Ha dengan jumlah produksi sebesar 705.402 ton, luas lahan

jagung seluas 61.524 Ha dengan jumlah produksi sebesar 359.506 ton, Ubi Kayu dengan luas lahan seluas 67.708 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.500.624 ton, kedelai dengan luas lahan seluas 2.392 Ha dengan jumlah produksi sebesar 2.935 ton.

1.6.2. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah diantaranya komoditas kelapa sawit, kelapa, kakao, dan kopi.

Pada Tahun 2019 luas areal tanaman kelapa sawit sebesar 15.044 Ha dengan total produksi sebesar 43.553 ton, kelapa dalam luas areal sebesar 5.951 Ha dengan total produksi sebesar 6.258 ton, kakao luas areal sebesar 4.006 Ha dengan total produksi sebesar 2.992 ton, karet dengan luas areal sebesar 5.408 Ha dengan total produksi sebesar 4.930,83 ton, tebu dengan luas areal sebesar 4.937 Ha dengan total produksi sebesar 28.523 ton, lada dengan luas areal sebesar 123 Ha dengan total produksi sebesar 101 ton, selain hasil perkebunan rakyat tersebut, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat perusahaan besar yang bergerak dibidang perkebunan seperti PTP Nusantara VII yang bergerak pada tanaman sawit, Gunung Madu Plantation, Gula Putih Mataram yang bergerak pada tanaman tebu dan gula.

1.6.3. Peternakan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan ternak besar maupun kecil. Untuk pengembangan ternak besar seperti sapi, kerbau maupun kambing potensi ketersediaan pakan cukup besar seperti rumput, limbah nenas, daun jagung, kulit kakao maupun pucuk daun tebu serta jerami padi. Sebagai gambaran pengembangan ternak di Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2019 populasi sapi sebanyak 297.253 ekor, kambing 270.543 ekor, ayam buras 1.032.780 ekor, ayam ras pedaging 2.151.805 ekor, dan ayam ras petelur 735.841 ekor.

1.6.4. Perikanan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan perikanan seperti kolam, perairan umum, perairan laut, keramba, mina padi maupun tambak. Potensi tersebut dapat dilihat dari jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2019 mencapai 45.233 ton.

1.6.5. Perindustrian

Potensi bidang industri di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar, hal ini karena didukung oleh ketersediaan potensi bahan baku yang cukup terutama industri yang bergerak pada bidang agribisnis. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah unit usaha industri sebanyak 1.706 unit.

dengan total investasi sebesar Rp.1.668.970.791.358,- milyar.

1.6.6. Perdagangan dan Jasa

Potensi bidang perdagangan dan jasa di Kabupaten Lampung Tengah cukup menjanjikan mengingat letak geografis Kabupaten Lampung Tengah yang cukup strategis, berada ditengah-tengah Propinsi Lampung serta dilintasi oleh Jalan Lintas Trans Sumatera. Selain itu telah dikembangkan kawasan niaga terpadu yang diharapkan dapat menarik investasi dibidang perdagangan dan jasa sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah agar lebih berkembang, serta didukung oleh pusat-pusat perdagangan dan jasa pada masing-masing kecamatan seperti pasar daerah, pasar kampung dan kios serta toko-toko yang semakin berkembang. Sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan SIUP yang telah diterbitkan jumlah usaha perdagangan mencapai 910 unit.

Volume ekspor produk yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 mencapai 221.265 ton, dengan total nilai ekspor mencapai 222.038.400 US\$, selain itu dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh sektor perbankan yang semakin berkembang baik bank nasional, bank daerah, maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1.6.7. Pertambangan

Sesuai dengan formasi geologi dan jenis tanah yang ada, maka Kabupaten Lampung Tengah memiliki deposit mineral yang potensial untuk pengembangan usaha pertambangan terutama bahan tambang galian C. Potensi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah diantaranya marmer, granit, andesit, felspart, pasir, diorit, Batu Kapur, Lempung, Pasir Kuarsa dan Pasir Batu (Sirtu).

1.7. PERTUMBUHAN EKONOMI/PDRB

1.7.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah merupakan gambaran potensi wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi.

Berdasarkan harga berlaku PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan. Pada Tahun 2019**) PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 47.937,70 (dalam milyar) atau meningkat sebesar 5,46 persen dibanding Tahun 2018*) yang sebesar Rp. 45.456,32 (dalam milyar).

Demikian juga berdasarkan harga konstan PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan, pada Tahun 2019**) PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.71.952,70 (dalam milyar) atau meningkat sebesar 8,46 persen dibanding Tahun 2018*) yang sebesar Rp. 66.340,55 (dalam milyar).

Tabel 1.2
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018 -2019 (Milyar Rupiah).

Kategori	Uraian	2018*)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.787,65	16.107,52
B	Pertambangan dan Penggalian	2.083,26	2.207,70
C	Industri Pengolahan	10.328,07	11.219,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	51,55	55,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,83	16,46
F	Konstruksi	5.036,46	5.388,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.820,93	5.134,73
H	Transportasi dan Pergudangan	1.248,79	1.329,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	454,42	489,26
J	Informasi dan Komunikasi	1.788,67	1.930,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	695,59	720,29
L	Real Estate	893,52	938,03
M,N	Jasa Perusahaan	47,23	49,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	687,95	720,14
P	Jasa Pendidikan	1.027,09	1.108,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	240,48	251,36
R,S,T,U	Jasa lainnya	248,85	269,40
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	45.456,32	47.937,70

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (diolah)
Keterangan; 2018) :angka sementara*
*2019**) :angka sangat sementara*

Tabel 1. 3
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018 -2019 (Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2018*)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.855,90	25.085,73
B	Pertambangan dan Penggalian	3.259,67	3.502,27
C	Industri Pengolahan	15.172,77	16.988,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	63,86	70,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,42	24,71
F	Konstruksi	6.957,29	7.606,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.592,94	7.364,15
H	Transportasi dan Pergudangan	1.779,80	1.906,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	754,08	831
J	Informasi dan Komunikasi	2.167,09	2.364,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.057,37	1.114,92
L	Real Estate	1.244,80	1.368,35
M,N	Jasa Perusahaan	76,75	81,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.138,34	1.203,68
P	Jasa Pendidikan	1.481,43	1.661,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	350,40	373,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	364,65	404,68
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	66.340,55	71.952,70

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (diolah)
Keterangan; 2018) :angka sementara*
*2019**) :angka sangat sementara*

1.7.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Tingkat perkembangan riil ekonomi makro Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari pencapaian indikator

Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE), atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada 2019 mencapai sebesar 5,46 persen.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018 -2019 (Persen)

Kategori	Uraian	2018*)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,44	2,03
B	Pertambangan dan Penggalian	5,73	5,97
C	Industri Pengolahan	5,95	8,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,87	7,88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,32	3,98
F	Konstruksi	8,53	7,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,02	6,51
H	Transportasi dan Pergudangan	5,71	6,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,46	7,67
J	Informasi dan Komunikasi	8,60	7,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,53	3,55
L	Real Estate	5,28	4,98
M,N	Jasa Perusahaan	4,26	4,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,05	4,68
P	Jasa Pendidikan	8,47	7,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,94	4,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,94	8,26
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,45	5,46

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (diolah)
Keterangan; 2018) :angka sementara*
*2019**) :angka sangat sementara*

Tabel 1.13
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018 -2019 (Persen)

Kategori	Uraian	2018*)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,38	5,16
B	Pertambangan dan Penggalian	7,56	7,44
C	Industri Pengolahan	8,37	11,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,31	10,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,46	5,51
F	Konstruksi	10,07	9,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,05	11,70
H	Transportasi dan Pergudangan	6,98	7,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,59	10,20
J	Informasi dan Komunikasi	9,90	9,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,89	5,44
L	Real Estate	8,97	9,93
M,N	Jasa Perusahaan	6,04	6,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,72	5,74
P	Jasa Pendidikan	10,78	12,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,89	6,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,30	10,98
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,83	8,46

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (diolah)
Keterangan; 2018) :angka sementara*
*2019**) :angka sangat sementara*

1.7.3. Pendapatan Perkapita

Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita penduduk pada setiap

Tahunnya. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2019**) sebesar Rp **56.155.575,15** (*Lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah lima belas sen*) atau meningkat 7,63 % dibanding Tahun 2018*) sebesar Rp **52.172.321,37** (*Lima puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu ribu tiga puluh tujuh sen*).

Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2019**) sebesar Rp **37.413.038,22** (*Tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu tiga puluh delapan rupiah dua puluh dua sen.*) atau meningkat sebesar 4,66 persen dibanding Tahun 2018*) sebesar Rp **35.748.297,77** (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen*).

1.8. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah selama Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut akan dibandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja dimungkinkan dapat diidentifikasinya sejumlah kendala dan permasalahan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut ini.

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas/ ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi Anggaran.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

TAHUN 2019

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH TAHUN 2016 - 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan sistem serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2030, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2020, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2016-2021 sebagai acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016-2021.

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016 – 2021 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka visi pembangunan lima tahun ke depan adalah **"Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan"**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.
3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.
5. Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

2.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk pencapaian tujuan dan sasaran selama periode RPJMD (lima tahun), serta memandu dan menjelaskan pelaksanaan strategi selama periode perencanaan yang tertuang dalam Strategi dan Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

I. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:
 - Menurunnya rasio angka kriminalitas.
 - Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui, strategi :
 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat
 2. Meningkatkan wawasan kebangsaan guna menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui strategi :
 1. Menjaga kelestarian situs budaya
 2. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah

II. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatkan konektivitas wilayah secara terpadu.

Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya konektivitas wilayah secara terpadu.
- Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
- Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat.
- Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui strategi:

1. Melakukan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan serta pelayanan transportasi
3. Melakukan pengelolaan jaringan irigasi
4. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak
5. Menurunkan luas kawasan kumuh

6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih
7. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi lingkungan
8. Meningkatkan luas wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi.

III. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan
- Meningkatnya kunjungan wisatawan
- Meningkatnya nilai investasi
- Menurunnya angka kemiskinan
- Meningkatnya kesempatan kerja
- Meningkatnya Kampung maju
- Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigrasi
- Menjaga ketersediaan pangan masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Meningkatkan produksi komoditas pertanian dan hortikultura.
2. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan
3. Meningkatkan produksi komoditas peternakan

4. Meningkatkan produksi komoditas perikanan
5. Meningkatkan kualitas dan produksi industri
6. Meningkatkan usaha perdagangan
7. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi
8. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan UKM
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada objek wisata yang potensial
10. Meningkatkan system pelayanan perizinan satu pintu sesuai dengan SOP
11. Menurunkan jumlah penduduk miskin.
12. Meningkatkan kualitas serta perlindungan terhadap tenaga kerja
13. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung
14. Meningkatkan pelayanan dan pelatihan kepada calon transmigran
15. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan.

IV. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas masyarakat. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :

- Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

- Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak
- Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan minat budaya baca masyarakat
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Meningkatkan jumlah wirausaha muda
7. Meningkatkan pembinaan cabang olah raga

V. Mengelola fungsi sumber daya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
- meningkatnya kesiapsiagaan bencana

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
2. Meningkatkan pengelolaan tata ruang
3. Meningkatkan kewaspadaan dini penanggulangan bencana.

VI. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

Tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.

Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja
- Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
- Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Meningkatkan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Meningkatkan system Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
4. Meningkatkan manajemen pelayanan dan administrasi OPD
5. Meningkatkan system pelayanan publik

2.1.3. Program Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka dilakukan berbagai kebijakan dan program, diantaranya :

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan misi 1 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- ***Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban dan ketentaram masyarakat,*** yang dilaksanakan melalui program:

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

- ***Peningkatan wawasan kebangsaan guna menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,*** yang dilaksanakan melalui program :

1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
3. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

4. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 5. Program pendidikan politik masyarakat.
 6. Program Mitigasi Konflik
- ***Peningkatan kelestarian situs budaya***, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program pengembangan nilai budaya.
 - ***Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah***, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program pengelolaan kekayaan budaya.
 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan misi 2 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- **Peningkatan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program pembangunan jalan dan jembatan.
 2. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 3. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 5. Program Perencanaan dan Monitoring Jalan dan Jembatan
 6. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong.

7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

- **Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan serta pelayanan transportasi**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 2. Program peningkatan pelayanan angkutan.
 3. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
 5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
- **Peningkatan pengelolaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program pembangunan turap/talud/bronjong
 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
 3. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 4. Program pengendalian banjir.
- **Peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program pengembangan perumahan.
- **Peningkatan pengelolaan kawasan kumuh perkotaan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program penyediaan dan pengolahan air baku.

- **Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
- **Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi lingkungan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
 2. Program Pengelolaan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Penerangan
- **Peningkatan luas wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
 2. Program Pelayanan dan Penyampaian Informasi dan Komunikasi.
 3. Program Pengawasan Menara Telekomunikasi
 4. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi
 5. Program Komunikasi Informasi dan Publikasi Masyarakat

3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 3 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- **Peningkatan produksi komoditas pertanian**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan
 2. Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura
 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
 5. Program Perencanaan Bidang Pertanian
 6. Program pemberdayaan kelembagaan pertanian
 7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- **Peningkatan produksi komoditas perkebunan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Informasi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan.
 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan
 3. Program peningkatan produksi perkebunan
 4. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan
 5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

6. Program peningkatan penyuluh peternakan dan perkebunan
- **Peningkatan produksi komoditas peternakan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program peningkatan produksi hasil peternakan.
 2. Program Peningkatan Mutu Daya Saing Produk Peternakan
 3. Program peningkatan Kapasitas Lembaga usaha Peternakan dan Perkebunan
 - **Peningkatan produksi komoditas perikanan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam).
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan
 3. Program pengembangan Perikanan Tangkap
 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan
 5. Program Peningkatan Mutu Daya Saing Produk Hasil Perikanan
 6. Program Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Pemberdayaan Pesisir
 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petugas Perikanan dan Kelautan dan Kelembagaan Usaha Perikanan
 - **Peningkatan kualitas dan produksi industri**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 3. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
- **Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan.
 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 3. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
 - **Peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perkoperasian
 - **Peningkatan kualitas sarana dan prasarana objek wisata**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - **Peningkatan pelayanan perizinan dan informasi peluang investasi**, yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 3. Program Peningkatan Pelayanan dan Kebijakan Penanaman Modal
- **Peningkatan program/kegiatan dalam upaya penurunan angka kemiskinan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - **Peningkatan kualitas serta perlindungan terhadap tenaga kerja**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa**, yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 3. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
 4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- **Peningkatan pelayanan dan pelatihan kepada calon transmigran,** yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program pengembangan wilayah transmigrasi
 2. Program transmigrasi lokal
 3. Program transmigrasi regional
 - **Peningkatan ketersediaan bahan pangan,** yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program peningkatan ketahanan pangan

4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sesuai Potensi dan Kearifan Lokal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 4 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- **Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Program Wajib Belajar 9 Tahun
 3. Program Pendidikan Non Formal

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- **Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- **Pencegahan dan pengendalian penyakit, yang dilaksanakan melalui program:**
 1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 2. Program Obat dan perbekalan kesehatan
 3. Program Pengawasan obat dan makanan
 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
 7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 8. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 10. Program Peningkatan Sarana Kesehatan dan Obat-obatan
- **Peningkatan pelayanan Rumah Sakit, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

2. Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
- **Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - **Peningkatan peserta KB aktif, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Keluarga berencana
 2. Program pelayanan kontrasepsi
 3. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
 4. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
 5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
 6. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.
 7. Program kesehatan reproduksi remaja
 8. Program pengendalian penduduk
 9. Program Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB
 - **Peningkatan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
 3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 4. Program peningkatan kualitas Hidup dan perlindungan perempuan
- **Peningkatkan jumlah wirausaha muda, yang dilaksanakan melalui program:**
 1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - **Peningkatan pembinaan cabang olahraga, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

5. Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 5 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- **Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup , yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Program pengendalian perubahan iklim
5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- **Pengendalian pemanfaatan ruang, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program perencanaan Tata Ruang
 2. Program Pemanfaatan Ruang
 3. Program pengendalian Pemanfaatan Ruang
- **Peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

6. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 6 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan program, sebagai berikut :

- **Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- **Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program pengembangan data/informasi pembangunan.
 2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya.
 3. Program Perencanaan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam.
 4. Program Perencanaan Ekonomi.
 5. Program perencanaan pembangunan daerah
 6. Program Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 7. Program Gotong Royong
- **Peningkatan kualitas sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
 2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan.
 - **Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
 - **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
 - **Peningkatan manajemen pelayanan administrasi perkantoran, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 3. Program peningkatan disiplin aparatur
 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- **Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan melalui program**
 1. Program penataan administrasi kependudukan
 - **Peningkatan pelayanan sistem kearsipan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 2. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
 - **Peningkatan pengelolaan perpustakaan, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 - **Peningkatan pelayanan informasi dan statistik daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program pengembangan data/informasi/statistic daerah
 - **Peningkatan pelayanan sistem keamanan informasi daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pengembangan dan Peningkatan Persandian dan Keamanan data
 - **Peningkatan Pelayanan administrasi kepegawaian, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- **Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2. Program penelitian dan pengembangan Inovasi dan Teknologi

- **Peningkatan kapasitas Lembaga Legislatif, yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

- **Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

2. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

- **Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Inventarisasi Nama Rupa Bumi

2. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

3. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan

- **Peningkatan pelayanan administrasi Hukum dan Peraturan Perundangan yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Evaluasi Terhadap Manfaat Pelaksanaan Otonomi Daerah

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3. Program Kesadaran dan Penegakan Hukum

- **Peningkatan pelayanan administrasi perekonomian yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2. Program Pengembangan Perekonomian Daerah

- **Peningkatan pelayanan administrasi kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Pelayanan Peningkatan Religiusitas Masyarakat
2. Program Pelayanan Peningkatan Kegiatan Lembaga Keagamaan
3. Program Pelayanan Peningkatan Apresiasi Terhadap Masyarakat

- **Peningkatan pelayanan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Administrasi
2. Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- **Peningkatan pelayanan administrasi organisasi dan tatalaksana yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
2. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan Sistem Informasi Layanan Publik

- **Peningkatan pelayanan administrasi pembangunan yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2. Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- **Peningkatan pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Bupati Lampung Tengah telah menetapkan dokumen penetapan kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target yang akan dicapai pada tahun 2019.

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target yang akan dicapai pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

MISI I : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga dalam kehidupan sosial yang

berlandaskan demokrasi, keadilan dan keberagaman budaya.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan Melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya, meliputi :

1. Menurunnya rasio angka kriminalitas dengan indikator sasaran :
 - Rasio angka kriminalitas sebesar 5,06
2. Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase kasus konflik sosial sebesar 100 persen.
3. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dengan indikator sasaran:
 - Prosentase situs budaya yang lestari sebesar 70 persen.
 - Prosentase sanggar seni budaya yang aktif sebesar 80 persen.

MISI II : Membangun dan Meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, meliputi :

1. Meningkatnya konektivitas wilayah secara terpadu, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 53,26 persen.
 - Prosentase pelayanan angkutan jalan 56,00 persen.

2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi, dengan indikator sasaran:
 - Prosentase Jaringan irigasi yang kondisinya baik 81,24 persen.
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Cakupan ketersediaan rumah layak huni 85 persen.
 - Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh 8 persen.
 - Persentase penduduk berakses air bersih 85 persen.
 - Persentase rumah tinggal bersanitasi 79 persen.
4. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah, dengan indikator sasaran :
 - Cakupan layanan telekomunikasi 75 persen.

MISI III : Membangun Ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan, meliputi:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, dengan indikator sasaran :
 - Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 5 persen.
 - Pertumbuhan ekonomi sektor industri 6 persen.
 - Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan 5 persen.
 - Prosentase peningkatan volume usaha koperasi 4 persen.

- Prosentase peningkatan volume usaha UMKM/UKM 8 persen.
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator sasaran
 - Prosentase peningkatan jumlah wisatawan 43,22 persen.
 - Rata-rata lama tinggal selama 1 hari
 3. Meningkatnya nilai investasi, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase peningkatan nilai investasi 10 persen.
 4. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator sasaran :
 - Angka kemiskinan 12,34 persen.
 5. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan indikator sasaran :
 - Angka pengangguran terbuka 2,62 persen.
 6. Meningkatnya jumlah desa cepat berkembang, dengan indikator sasaran:
 - Prosentase peningkatan jumlah desa dengan kategori cepat berkembang 5 persen.
 7. Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigran, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah peserta transmigran yang diberangkatkan sebanyak 20 KK.
 8. Menjaga ketersediaan pangan masyarakat, dengan indikator sasaran:
 - Rasio ketersediaan pangan utama (beras) 530 Kg/Perkapita.

MISI IV: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, meliputi :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dengan indikator sasaran :
 - Rata-rata lama sekolah 8,06 persen.
 - Lama harapan sekolah 12,25 persen.
 - Nilai rata-rata ujian SD 76 persen.
 - Nilai rata-rata ujian SMP 80,80 persen.
2. Meningkatnya derajat Kesejahteraan Masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Usia Harapan Hidup 69,43 Tahun.
 - Angka kematian bayi 3 per 1000 KH.
 - Angka kematian Ibu 30 per 100.000 KH.
 - Prevalensi Stunting 15 persen.
3. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dengan indikator sasaran :
 - Laju pertumbuhan penduduk 0,81 Persen
4. Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator sasaran :
 - Indek pembangunan Gender 89,40 persen.
 - Prosentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak 100 persen.
5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase peningkatan jumlah wirausahaan muda 5 persen.
 - Persentase cabor yang berprestasi 75 persen

MISI V: Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan, meliputi :

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran:
 - Indek kualitas air 52 IKA.
 - Indek kualitas udara 75 IKU
 - Indek tutupan lahan 30 TL
2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan indikator sasaran:
 - Ketataan terhadap RT/RW 77 persen.
3. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dengan indikator sasaran:
 - Prosentase desa siaga bencana sebesar 3,86 persen.

MISI VI : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat, meliputi :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, dengan indikator sasaran :

- Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah nilai hasil evaluasi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Nilai B.
 - Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 8 persen.
 3. Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Indek Kepuasan Masyarakat 80,83 persen.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah partisipatif yang diambil. Termasuk pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugastugas lainnya.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja disini mencakup tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PK), adapun pengukuran tingkat pencapaian sasaran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2021. Secara umum pengukuran kinerja baru dapat dilakukan sampai pada kelompok indikator hasil (*indikator outcomes*).

3.2. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja dilakukan agar dapat diketahui kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat dinilai dan menjadi umpan balik (*feed back*) guna perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran, sekaligus menjelaskan hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran. Adapun evaluasi kinerja pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Misi I

Sasaran 1 : Menurunnya Rasio Angka Kriminalitas.

Sasaran ini dikembangkan melalui 2 (dua) program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.576.227.500,-

Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran menurunnya rasio angka kriminalitas dapat dilihat dari turunnya rasio angka kriminalitas.

• **Jumlah Tindak Kriminal**

Pada tahun 2019 rasio angka kriminalitas per 10.000 penduduk ditargetkan menurun sebesar 5,06 persen dengan realisasi sebanyak 4,25 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 83,99 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan menurun menjadi 4,62 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 91,99 persen.

Sasaran 2: Meningkatnya Kerukunan Hidup Dalam Bermasyarakat

Sasaran ini dikembangkan melalui 6 (enam) program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.1.275.341.750,-.

Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus konflik sosial.

- **Jumlah Kasus Konflik Sosial**

Pada tahun 2019 Kondisi di Kabupaten Lampung Tengah tetap kondusif dan tidak terjadi Konflik yang ditimbulkan akibat perselisihan SARA. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJM-D, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan yang dilakukan pemerintah bersamasama dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), maupun Forkompinda.

Sasaran 3: Meningkatnya Apresiasi Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Budaya

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.055.984.200,- Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran Meningkatkan Apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

- **Prosentase Situs Budaya Yang Lestari**

Prosentase situs budaya yang lestari pada tahun 2019 ditargetkan meningkat menjadi 70 persen dengan realisasi sebesar 70 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 90 persen pada akhir

periode RPJMD, maka capaian kinerja tahun 2018 sebesar 77,78 persen.

- **Prosentase Sanggar Seni Budaya Yang Aktif**

Prosentase Jumlah sanggar seni dan budaya yang aktif tahun 2019 ditargetkan meningkat menjadi 85 persen dengan realisasi sebesar 80 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,11 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 90 persen pada akhir periode RPJMD, maka capaian kinerja tahun 2019 sebesar 88,89 persen.

2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Misi 2

Sasaran 1: Meningkatnya Konektivitas Wilayah Secara Terpadu

Sasaran ini dikembangkan melalui 12 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 251.815.512.887,-. Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur prasarana jalan dan irigasi.

- Prosentase panjang jaringan jalan dalam Kondisi baik di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 53,26 persen dengan realisasi sebesar 61,08 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 114,68 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan menjadi 60,89 persen pada akhir periode RPJMD maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 baru mencapai 100,31 persen.

- Prosentase pelayanan angkutan jalan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 56,00 persen dengan realisasi sebesar 60 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107,14 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan menjadi 57,92 persen pada akhir periode RPJMD maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 baru mencapai 103,59 persen.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 38.567.858.350,-. Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.

- Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 81,24 persen dengan realisasi sebesar 80 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,47 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan menjadi 83,32 persen pada akhir periode RPJMD maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 baru mencapai 96,02 persen.

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Permukiman Masyarakat

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 36.905.335.550,-. Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat.

- **Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Jumlah rumah tangga yang menghuni rumah sehat/layak huni pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 85 persen dengan realisasi sebesar 88,12 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,53 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 100 persen pada akhir periode, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 85 persen.

- **Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh**

Jumlah prosentase penurunan luasan kawasan kumuh pada tahun 2019 ditargetkan menurun menjadi sebesar 8,00 persen dengan realisasi sebesar 1,54 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 20,53 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 4,50 persen pada akhir periode, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 34,22 persen.

- **Prosentase Penduduk Berakses Air Bersih**

Prosentase penduduk berakses air bersih pada tahun 2019 ditargetkan meningkat menjadi sebesar 85,00 persen dengan realisasi sebesar 88,12 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,67 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 91,00 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 96,84 persen.

- **Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Prosentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2019 ditargetkan meningkat menjadi 79,00 persen dengan realisasi sebesar 93,12 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 117,87 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 89,00 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 104,63 persen.

Sasaran 4 : Meningkatkan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Daerah

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 12.385.426.300,- Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah

• **Cakupan Layanan Komunikasi**

Cakupan layanan komunikasi pada tahun 2019 ditargetkan meningkat menjadi sebesar 65,00 persen dengan realisasi sebesar 72,5 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,54 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan meningkat menjadi 85,00 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 85,29 persen.

3. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Misi III

Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan

Sasaran ini dikembangkan melalui 33 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 28.424.208.750,- Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan

yang dilaksanakan pada sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan.

- **Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian**

Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada tahun 2019, sementara masih digabungkan dengan sektor kehutanan dan perikanan dengan laju pertumbuhan ekonominya sebesar 2,03 persen, sehingga belum dapat diukur realisasi dari sektor pertanian yang ditargetkan sebesar 5 persen dan diakhir target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 5,34 persen.

- **Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri**

Pertumbuhan ekonomi sektor industri pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 6 persen dengan realisasi sebesar 8,63 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 143,83 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 6,65 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 129,77 persen .

- **Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan**

Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 5 persen dengan realisasi sebesar 6,51 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 130,2 persen. Apabila dibandingkan dengan target

rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 5,61 pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 116,04 persen.

- **Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi**

Prosentase peningkatan volume usaha koperasi pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 4 persen dengan realisasi sebesar 17,23 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 430,75 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 6 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 287,17 persen.

- **Prosentase Peningkatan Volume Usaha UMKM/UKM**

Prosentase peningkatan volume usaha UMKM/UKM pada tahun 2019 ditargetkan 8 persen dengan realisasi sebesar 9,87 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 123,38 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 10 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 98,7 persen.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Sasaran ini dikembangkan melalui 2 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.558.941.500,- Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah.

- **Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan**

Prosentase peningkatan jumlah wisatawan pada Tahun 2019 ditargetkan mencapai 43,22 persen dengan realisasi sebesar 77,63 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 179,62 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 75,72 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 102,52 persen.

- **Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan**

Rata-rata lama tinggal wisatawan ditargetkan meningkat menjadi sebesar 1 hari dengan realisasi sebesar 1 hari atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 3 hari pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 33,33 persen.

Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Investasi.

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.316.978.550,-

- **Prosentase Peningkatan Nilai Investasi**

Prosentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2019 ditargetkan 10 persendengan realisasi sebesar 9 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 10 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 90 persen.

Sasaran 4 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 4.479.102.500,-

- **Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan pada Tahun 2019 ditargetkan menurun menjadi sebesar 12,34 persen dengan realisasi sebesar 12,62 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,27 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 10,66 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 118,39 persen.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kesempatan Kerja.

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 884.430.000,-

- **Angka Pengangguran Terbuka**

Angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 ditargetkan menurun menjadi sebesar 2,62 persendengan realisasi sebesar 2,62 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 2,10 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 124,76 persen.

Sasaran 6 : Meningkatnya Desa Cepat Berkembang.

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 5.819.223.000,-

- **Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Dengan Kategori Cepat Berkembang**

Persentase peningkatan jumlah desa dengan kategori cepat berkembang pada tahun 2019 ditargetkan 5 persen dengan realisasi sebesar 14,14 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 282 persen.Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 8,31 persen pada

akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 170,36 persen.

Sasaran 7: Meningkatkan Pelayanan Kepada Calon Transmigran.

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 program, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 471.235.500,-

• **Jumlah Penduduk Yang Mengikuti Program Transmigrasi Ke Luar Lampung Tengah**

Jumlah penduduk yang mengikuti program transmigrasi ke luar Lampung Tengah pada Tahun 2019 ditargetkan 20 KK dengan realisasi sebesar 13 KK atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 65 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 20 KK pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 65 persen.

Sasaran 8 : Menjaga Ketersediaan Pangan Masyarakat

Sasaran ini dikembangkan melalui 1 program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.4.043.110.250,-

• **Rasio Ketersediaan Pangan**

Rasio ketersediaan pangan pada Tahun 2019 ditargetkan 530 kg/penduduk/tahun dengan realisasi sebesar 368,17 kg/penduduk/tahun persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 69,47 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 641,70 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 57,37 persen.

4. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Misi IV

Sasaran1: Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.202.358.092.000,-

- **Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah pada Tahun 2019 ditargetkan 8,06 dengan realisasi sebesar 8,09 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,37 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 8,52 Tahun pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 94,95 persen.

- **Lama Harapan Sekolah**

Lama harapan sekolah pada Tahun 2019 ditargetkan 12,25 persen dengan realisasi sebesar 12,25 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 12,27 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 99,84 persen.

- **Nilai Rata-Rata Ujian SD**

Nilai rata-rata ujian SD pada Tahun 2019 ditargetkan 76 persen dengan realisasi sebesar 76 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 77,00 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 98,70 persen.

- **Nilai Rata-Rata Ujian SMP**

Nilai rata-rata ujian SMP pada Tahun 2019 ditargetkan 80,80 persen dengan realisasi sebesar 81 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,25 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 80,90 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 100,12 persen.

Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Sasaran ini dikembangkan melalui 16 program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.164.019.257.195,-

- **Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan hidup pada Tahun 2019 ditargetkan 69,43 tahun. Realisasi sebesar 69,46 tahun atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 69,80 tahun pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 99,47 persen.

- **Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi pada tahun 2019 ditargetkan menurun menjadi sebesar 3 per 1000 kel.Hidup dengan realisasi 3,63 per 1000 kelahiran hidup.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menurun menjadi 2,00 persen per 1000 keluarga hidup kasus pada akhir periode RPJMD, namun demikian apabila dibandingkan dengan target nasional yang sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup maka angka kematian bayi di Kabupaten Lampung Tengah masih lebih rendah.

- **Angka Kematian Ibu Melahirkan**

Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 30 per 100.000 kelahiran hidup dengan realisasi 17 per 100.000 kelahiran hidup.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan menurun menjadi 10,00 persen per 100.000 keluarga hidup pada akhir periode RPJMD.

- **Prevalensi Stunting (Jumlah Balita Penderita Stunting)**

Prevalensi stunting pada tahun 2019 ditargetkan menurun menjadi sebesar 15 persen dengan realisasi 13,85 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 92,33 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencanayang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan menurun menjadi 10,00 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 138,5 persen.

Sasaran 3: Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran ini dikembangkan melalui 9 program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.13.840.412.155,-

Angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 0,81 persen dengan realisasi sebesar 0,80 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,76 persen.

Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.092.927.800,-

- **Indek Pembangunan Gender**

Indek Pembangunan Gender pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 89,40 persen dengan realisasi sebesar 89,40 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan menjadi 89,56 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 99,82 persen.

- **Prosentase Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak**

Prosentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan menjadi 100 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 100 persen.

Sasaran 5 : Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga.

Sasaran ini di kembangkan melalui 3 program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.183.851.575,-

- **Prosentase Peningkatan Jumlah Wirausahawan Muda**
Prosentase peningkatan jumlah wirausahawan muda pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 5 persen dengan realisasi sebesar 3 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 60 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menjadi 5 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 60 persen.
- **Prosentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi**
Prosentase cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 75 persen dengan realisasi sebesar 28 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 37,33 persen.
Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan menjadi 85 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 32,94 persen.

5. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Misi V

Sasaran 1: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.13.475.873.000,-

- **Indeks Kualitas Air**

Indeks kualitas air di Tahun 2019 ditargetkan 52 IKA dengan realisasi sebesar 71,48 IKA atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 137,46 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 65,00 IKA pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 109,97 persen.

- **Indeks Kualitas Udara**

Indeks kualitas udara di Tahun 2019 ditargetkan 75 IKU dengan realisasi sebesar 86,35 IKU atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 115,13 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 78,00persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 110,71 persen.

- **Indeks Tutupan Lahan**

Indeks tutupan lahan di Tahun 2019 ditargetkan 30 TL dengan realisasi sebesar 30,13 TL atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100,43 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 52,00 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 57,94 persen.

Sasaran 2: Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 program dengan jumlah lokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.604.380.000,-

- **Ketaatan Terhadap RT RW**

Ketaatan terhadap RT RW di Tahun 2019 ditargetkan 77 persen dengan realisasi sebesar 73,4 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 95,32 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 82 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 89,51 persen.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana.

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 program dengan jumlah lokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 306.428.000,-

- **Prosentase Desa Siaga Bencana**

Prosentase desa siaga bencana di Tahun 2019 ditargetkan 3,86 persen dengan realisasi sebesar 3,86 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai 3,86 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 100 persen.

6. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Misi VI

Sasaran 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan.

Sasaran ini dikembangkan melalui 9 program dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.11.179.206.185,-

- **Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Nilai akuntabilitas kinerja adalah nilai hasil evaluasi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Tahun 2019 ditargetkan nilai B dengan realisasi nilai B atau dengan nilai capaian kinerja 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 - 2021 yang diharapkan mencapai A pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 80 persen.

- **Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 ditargetkan mendapatkan WTP dengan realisasi WTP atau dengan nilai capaian kinerja 100 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai WTP pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 100 persen.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Sasaran ini dikembangkan melalui 1 program, dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.29.397.658.930,-

Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada sasaran pencapaian sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah

- **Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah**
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 8 persen dengan realisasi 7,5 persen atau dengan nilai capaian kinerja 94,03 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 8 persen pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 94,03 persen.

Sasaran 3: Meningkatnya Tingkat Kepuasan Pelayanan Masyarakat

Sasaran ini dikembangkan melalui 37 program, dengan jumlah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.286.237.297.168,-

Secara umum keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat.

- **Indek Kepuasan Masyarakat**

Indek kepuasan masyarakat pada tahun 2019 ditargetkan mendapatkan nilai 80,83 dengan realisasi nilai 85,90 atau dengan nilai capaian kinerja 106,27 persen. Apabila dibandingkan dengan target rencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan mencapai 81,26 pada akhir periode RPJMD, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 105,71 persen.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan tolak ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021. Sangat disadari laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Penyempurnaan laporan dimasa yang akan datang akan terus dilakukan agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Secara umum Pencapaian Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 berdasarkan pengukuran kinerja sasaran pada tingkat hasil (*outcomes*) telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keberhasilan pencapaian sasaran ditunjukkan dari pencapaian

kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran serta ditunjang oleh data-data indikator kinerja makro dari masing-masing sasaran.

Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan, alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran juga secara umum dapat terealisasi sesuai dengan target atau tingkat capaian yang diharapkan. Upaya pencapaian sasaran sesuai Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019, telah diupayakan secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, namun demikian berbagai permasalahan/kendala sering terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga perlu diupayakan jalan keluar/solusi untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Kiranya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 ini, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan kinerja. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Perfomance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Gunung Sugih, 30 Maret 2020

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI I

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Menurunnya rasio angka kriminalitas	Rasio Angka kriminalitas	5.06	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,056,177,000
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	520,050,500
2 Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat	Prosentase penurunan konflik sosial	100	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	42,924,100
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	157,690,400
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	95,512,100
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	47,520,850
			Program pendidikan politik masyarakat	187,748,500
			Program Mitigasi Konflik	743,945,800

3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Prosentase Situs budaya yang lestari	70	Program Pengembangan Nilai Budaya	239,364,500
		Prosentase Sanggar seni budaya yang aktif	80	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1,277,058,100
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	539,561,600
		JUMLAH PROGRAM		Program : 11	
		JUMLAH ANGGARAN			4,907,553,450

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI II

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatkan konektivitas wilayah secara terpadu	Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	53	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	37,454,287,467
	Prosentase pelayanan angkutan jalan	56	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	179,339,216,935
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	16,935,610,200
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2,172,367,535
			Program Perencanaan dan Monitoring Jalan dan Jembatan	4,631,482,900
			Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong.	9,043,297,400
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi	300,000,000
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	150,000,000
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	600,323,450

			Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	53,360,000	
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	837,567,000	
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	298,000,000	
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	81	Program pembangunan turap/talud/bronjong	6,299,822,000
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	22,696,864,350	
			Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	6,949,158,300	
			Program Pengendalian Banjir	2,622,013,700	
3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	85	Program Pengembangan Perumahan	2,518,925,000
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	8	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1,115,816,650
		Prosentase penduduk berakses air bersih	85	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	19,960,502,200
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	79	Program Pengelolaan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Penerangan	9,881,930,700

			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3,428,161,000	
4	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	75	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8,599,877,500
				Program Pelayanan dan Penyampaian Informasi dan Komunikasi	667,487,500
				Program Pengawasan Menara Telekomunikasi	19,287,150
				Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	2,994,895,150
				Program Komunikasi Informasi dan Publikasi Masyarakat	103,879,000
				JUMLAH PROGRAM	Program : 26
				JUMLAH ANGGARAN	339,674,133,087

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI III

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	5	Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	1,914,099,800
	Pertumbuhan ekonomi sektor industri	6	Program Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	977,506,700
	Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	468,724,000
	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	7,435,875,500
	Prosentase peningkatan volume Usaha UMKM/UKM	8	Program Perencanaan Bidang Pertanian	386,791,600
			Program pemberdayaan kelembagaan pertanian	3,261,649,200

			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	924,123,000
			Program Informasi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan	166,597,500
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan	452,673,800
			Program peningkatan produksi perkebunan	115,285,700
			Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan	115,930,000
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	35,800,000
			Program peningkatan penyuluh peternakan dan perkebunan	117,500,000
			Program peningkatan produksi hasil peternakan	1,578,635,300
			Program Peningkatan Mutu Daya Saing Produk Peternakan	602,612,600
			Program peningkatan Kapasitas Lembaga usaha Peternakan dan Perkebunan	46,496,300
			Program Pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)	916,000,000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan	466,012,000

			Program pengembangan Perikanan Tangkap	8,347,500
			Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	604,019,000
			Program Peningkatan Mutu Daya Saing Produk Hasil Perikanan	702,030,000
			Program Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Pemberdayaan Pesisir	39,304,000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petugas Perikanan dan Kelautan dan Kelembagaan Usaha Perikanan	25,381,400
			Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	245,000,000
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,033,530,000
			Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	363,750,000
			Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	885,271,550
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3,413,569,750

			Program peningkatan dan pengembangan ekspor	170,767,250	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	74,142,500	
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	504,033,300	
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	182,530,000	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perkoperasian	190,219,500	
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	46	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	959,532,500
		Rata-rata lama tinggal (hari)	1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2,599,409,000
3	Meningkatnya nilai investasi	Prosentase peningkatan nilai investasi	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1,216,168,550
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	63,600,000	
			Program Peningkatan Pelayanan dan Kebijakan Penanaman Modal	37,210,000	

4	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (persen)	12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2,278,149,000
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	294,320,000
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	26,500,000
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,560,605,000
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	319,528,500
5	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka (persen)	3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	461,360,000
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	206,885,000
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	216,185,000
6	Meningkatnya jumlah desa cepat berkembang	Prosentase jumlah desa dengan kategori cepat berkembang	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	3,612,595,500
				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1,585,927,000

			Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	145,462,500	
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	475,238,000	
7	Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigran	Jumlah peserta tranmigran yang diberangkatkan	20 KK	Program transmigrasi regional	332,900,000
				Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	70,700,000
				Program Transmigrasi lokal	67,635,500
8	Menjaga ketersediaan pangan masyarakat	Rasio Ketersediaan pangan utama (beras)kg/ perkapita	530	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4,043,110,250
		JUMLAH PROGRAM		Program : 54	
		JUMLAH ANGGARAN			48,997,230,050

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI IV

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,06	Program Pendidikan Anak Usia Dini	759,400,000
	Lama harapan sekolah (tahun)	12,25	Program Wajib Belajar 9 Tahun	-
	Nilai rata-rata ujian SD	76	Program Pendidikan Non Formal	575,000,000
	Nilai rata-rata ujian SMP	80,80	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16,627,695,700
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	713,570,500
2 Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,43	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	227,000,000
	Angka Kematian Bayi (Per 1000)	3	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	140,000,000
	Angka Kematian Ibu (Per 100.000)	30	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	45,000,000

	Prevalensi Stunting (Persen)	15	Program Obat dan perbekalan kesehatan	310,000,000	
			Program Pengawasan obat dan makanan	75,000,000	
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	359,490,000	
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	180,000,000	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	555,000,000	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	495,000,000	
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	16,741,595,200	
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	334,516,500	
			Program Peningkatan Sarana Kesehatan dan Obat-obatan	57,228,142,736	
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	3,842,157,000	
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	402,592,000	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	32,239,638,074	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	50,844,125,685	
3	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	0,81	Program Keluarga Berencana	336,355,100

			Program pelayanan kontrasepsi	429,099,800	
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	310,150,000	
			Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	59,999,075	
			Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	66,315,000	
			Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	73,795,000	
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	33,775,000	
			Program Pengendalian Penduduk	118,481,600	
			Program Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB	12,412,441,580	
4	Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak	Indek Pembangunan Gender (persen)	89,40	Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan Gender dlm pembangunan	387,167,250
		Prosentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	251,807,750
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	416,036,350	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	37,916,450	

5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Prosentase peningkatan jumlah wirausahaan muda	5	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1,098,488,575
		Persentase cabor yang berprestasi	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	865,363,000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	220,000,000
		JUMLAH PROGRAM		Program : 37	
		JUMLAH ANGGARAN			199,812,114,925

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI V

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indek Kualitas Air (IKA)	52	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,668,706,000
	Indek Kualitas Udara (IKU)	75	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	200,000,000
	Indek Tutupan Lahan (TTL)	30	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & LH	11,600,000
			Program Pengendalian Perubahan Iklim	10,000,000
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	11,585,567,000
2 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	77	Program Perencanaan Tata Ruang	420,195,000

			Program Pemanfaatan Ruang	19,490,000	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	164,695,000	
3	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Prosentase desa siaga bencana	3,86	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	159,660,000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	146,768,000	
		JUMLAH PROGRAM	Program : 10		
		JUMLAH ANGGARAN		14,386,681,000	

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI VI

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Kategori)	B	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,995,563,785
	Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Opini)	WTP	Program Pengembangan data/ informasi Pembangunan	133,264,000
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	655,000,000
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	1,431,642,000
			Program Perencanaan Ekonomi	768,520,000
			Program perencanaan pembangunan daerah	1,196,596,200
			Program Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	369,010,100

			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3,028,610,100	
			Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	601,000,000	
2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	8	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	29,397,658,930
3	Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (Nilai)	80,83	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,402,330,610
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91,806,238,295	
			Program peningkatan disiplin aparatur	1,298,750,000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18,846,625,550	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	4,258,558,283	
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	66,480,000	
			Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	44,781,000	
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	625,735,000	
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	44,614,000	

			Program Pengembangan dan Peningkatan Persandian dan Keamanan data	51,352,500
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,128,821,850
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	149,253,900
			Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2,693,044,600
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	22,952,341,155
			Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	588,521,500
			Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	150,000,000
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	-
			Program Inventarisasi Nama Rupa Bumi	54,107,400
			Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	122,935,500
			Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	85,942,300
			Program Evaluasi Terhadap Manfaat Pelaksanaan Otonomi Daerah	16,140,000
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	442,760,000
			Program Kesadaran dan Penegakan Hukum	296,530,500

			Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	169,462,250
			Program Pengembangan Perekonomian Daerah	340,750,225
			Program Pelayanan Peningkatan Religiusitas Masyarakat	1,647,031,800
			Program Pelayanan Peningkatan Kegiatan Lembaga Keagamaan	1,522,614,200
			Program Pelayanan Peningkatan Apresiasi Terhadap Masyarakat	15,110,476,400
			Program Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Administrasi	43,501,400
			Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3,259,668,500
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	97,309,300
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	30,000,000
			Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	120,000,000

			Program Peningkatan Sistem Informasi Layanan Publik	371,450,000
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	80,000,000
			Program Gerakan Gotong Royong	6,220,000,000
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6,691,684,300
	JUMLAH PROGRAM		Program : 47	
	JUMLAH ANGGARAN			323,406,677,433